Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI: STUDI DI KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

Sefira Dewi Nazarina[1], Radjikan[2], Muhammad Roisul Basyar[3]
[123] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

Sevira.nazerina@gmail.com
radjikan@untag-sby.ac.id
roisulbasyar@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kecamatan Driyorejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, aparat Kecamatan Driyorejo, penanggung jawab program gizi puskesmas, kepala desa, kader kesehatan, kader Tim Pendamping Keluarga, serta keluarga penerima manfaat di desa locus stunting. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang meninjau tiga variabel yaitu: (1) mudah/tidaknya masalah dikendalikan, (2) kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, dan (3) variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 di Kecamatan Driyorejo berjalan cukup baik dengan dukungan kelembagaan yang kuat, pedoman yang jelas, sarana posyandu yang memadai, serta dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang menjaga kelancaran pelaksanaan. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi gizi, mobilitas tinggi keluarga pekerja industri, pola asuh yang kurang konsisten, dan program makanan tambahan yang belum optimal. Secara keseluruhan, kebijakan menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan penguatan agar hasilnya lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Bupati Gresik No. 9 Tahun 2023, Kecamatan Driyorejo, Mazmanian dan Sabatier.

A B S T R A C T

This study examines the implementation of Gresik Regent Regulation Number 9 of 2023 on integrated stunting reduction acceleration in Driyorejo District. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants consist of officials from the Gresik Health Office, Driyorejo District officers, nutrition program coordinators at the community health centers, village heads, health cadres, Family Assistance Team cadres, and beneficiary families in stunting locus villages. The implementation analysis uses Mazmanian and Sabatier's theory, which reviews three

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com

variables: (1) the ease or difficulty of controlling the problem, (2) the policy's ability to structure the implementation process, and (3) external variables influencing implementation. The findings indicate that the implementation of Gresik Regent Regulation Number 9 of 2023 in Driyorejo District has proceeded fairly well, supported by strong institutional arrangements, clear guidelines, adequate posyandu facilities, cross-sectoral collaboration, and active community participation. However, its effectiveness is still hindered by low nutrition literacy, high mobility among industrial worker families, inconsistent childcare practices, and suboptimal supplementary feeding programs. Overall, the policy shows progress, yet requires further strengthening to achieve more effective outcomes.

Keywords: Policy Implementation, Stunting Reduction Acceleration, Gresik Regent Regulation No. 9 of 2023, Driyorejo District, Mazmanian and Sabatier.

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan isu kesehatan global yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, seperti terhambatnya pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak, dan penurunan produktivitas di usia dewasa (WHO, 2020). Anak stunting umumnya mengalami kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau lingkungan tidak sehat selama periode 1.000 HPK sehingga perkembangan fisik maupun kognitifnya terhambat. Meskipun berbagai intervensi dilakukan, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi dan menempati posisi atas di Asia Tenggara (FAO, 2023).

Pada tingkat nasional, pemerintah telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 melalui strategi holistik dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 (Indonesia, 2021). Namun capaian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024, tetapi masih jauh dari target RPJMN (Kemenkes, 2025). Pada level daerah, Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika berbeda, dengan jumlah kasus stunting meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Perkembangan Kasus Stunting di Kabupaten Gresik
Tahun 2022-2024
Sumber: Gresik Urus Stunting (GUS), 2025

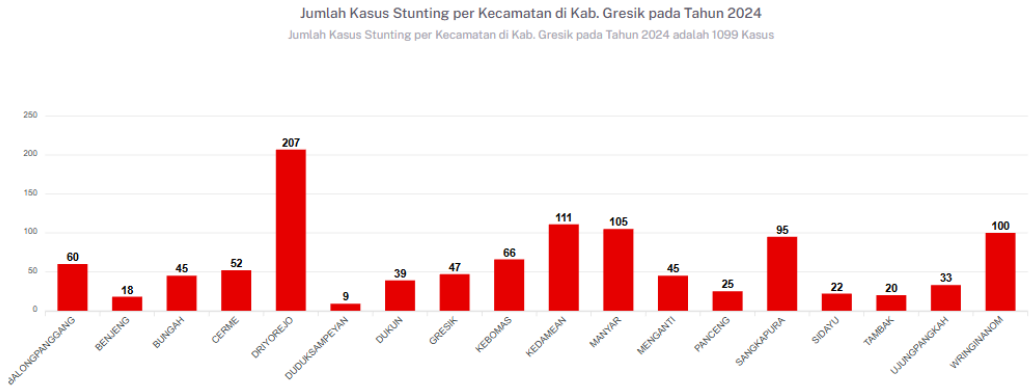
Apabila ditinjau lebih mendalam, kondisi Kabupaten Gresik dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan jumlah kasus stunting. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2022 tercatat 497 kasus stunting, meningkat menjadi 718 kasus pada 2023, dan kembali

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

melonjak signifikan hingga 1.090 kasus pada 2024. Lonjakan kasus tersebut mengindikasikan adanya hambatan implementasi kebijakan, terutama pada aspek koordinasi lintas sektor, pemenuhan gizi masyarakat, dan efektivitas intervensi di level desa (Trisilawati & Syahputri, 2023).

Sebagai tindak lanjut dari tingginya angka stunting di Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Regulasi ini menjadi pedoman pelaksanaan intervensi lintas sektor, mulai dari intervensi spesifik seperti pemenuhan gizi ibu hamil hingga intervensi sensitif seperti peningkatan sanitasi, edukasi kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan. Pada tahun 2025, prevalensi stunting di Gresik tercatat berada pada angka 15,2 persen, menunjukkan bahwa percepatan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai (Infogresik, 2025).

Selain itu, kasus stunting di Kabupaten Gresik juga tidak merata antarwilayah. Kecamatan Driyorejo tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 207 balita pada tahun 2024. Sebaran tersebut tercantum pada Gambar 2 berikut:

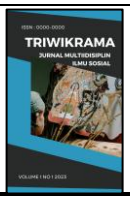


Gambar 2 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024
Sumber: Gresik Uurus Stunting (GUS), 2025

Distribusi kasus stunting antar kecamatan pada tahun 2024 menunjukkan disparitas yang jelas. Kecamatan Driyorejo menjadi penyumbang tertinggi dengan 207 kasus, disusul Kedamean, Manyar, dan Wringinanom. Sementara itu, beberapa kecamatan lain mencatat angka yang lebih rendah, seperti Duduksampeyan dan Benjeng. Kondisi ini mempertegas kebutuhan pendekatan yang lebih terarah dan tidak seragam antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Gresik sebelumnya juga telah menetapkan 10 kecamatan prioritas penanganan stunting, termasuk Driyorejo, sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan intervensi yang berbasis data (Abraham, 2022).

Fokus pada Kecamatan Driyorejo semakin relevan karena wilayah ini tidak hanya mencatat kasus tertinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh urbanisasi, tingginya mobilitas penduduk, serta heterogenitas sosial ekonomi yang kompleks. Banyak keluarga pendatang baru mengetahui status gizi anak setelah mengikuti Posyandu, menunjukkan bahwa permasalahan stunting tidak hanya bersumber dari faktor lokal, tetapi juga dinamika migrasi (KabarBaik.co, 2025). Pada tingkat desa,

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com



distribusi kasus juga tidak merata; Desa Mojosarirejo, Petiken, dan Karangandong memiliki jumlah kasus lebih tinggi dibanding desa lain, sehingga memerlukan intervensi yang lebih intensif (Kurniati et al., 2025).

Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, penting untuk menilai sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 berjalan efektif di Driyorejo, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier untuk menganalisis tiga aspek utama: (1) mudah/tidaknya masalah dikendalikan, (2) kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, dan (3) variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Minimnya penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji implementasi Perbup ini di Kecamatan Driyorejo menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan agar dapat memberikan bukti empiris dan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

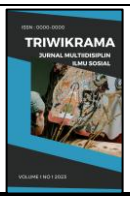
Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan publik secara sistematis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam KBBI, kebijakan dimaknai sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu rencana atau tindakan, khususnya dalam konteks pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan. Thomas R. Dye (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever governments choose to do or not to do*, yang menegaskan bahwa tindakan maupun ketidakberpihakan pemerintah terhadap suatu isu sama-sama merupakan bentuk kebijakan. Pandangan ini diperkuat oleh Lasswell dan Kaplan yang memandang kebijakan publik sebagai program rasional yang dirancang secara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Jones (1984) menempatkan kebijakan sebagai keputusan strategis atau *grand design* dalam manajemen publik yang disusun secara kolektif untuk memecahkan masalah masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan untuk mengubah keputusan politik menjadi aktivitas operasional yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Edwards III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) menambahkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi, serta variabel lingkungan di luar kebijakan. Mereka menekankan bahwa dukungan publik, kepemimpinan, dan kondisi sosial ekonomi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2009) yang menyebut implementasi sebagai tahap paling kompleks karena di dalamnya muncul berbagai tantangan praktis seperti keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat, dan koordinasi antaraktor.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Model Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel pokok, (1) mudah/tidaknya masalah dikendalikan, (2) kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, dan (3) variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan berkaitan dengan tingkat kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap populasi, serta besarnya perubahan perilaku yang diharapkan. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dilakukan apabila kelompok sasaran relatif homogen dan jumlah sasaran terbatas. Sebaliknya, masalah yang bersifat kompleks serta kelompok sasaran yang heterogen cenderung menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, penggunaan teori kausal yang memadai, kecukupan alokasi sumber daya, serta keterpaduan koordinasi antar lembaga pelaksana. Kebijakan yang dirumuskan secara jelas, didukung landasan teoritis yang kuat, serta dilengkapi dengan aturan pelaksana dan mekanisme rekrutmen aparatur yang tepat akan lebih mudah diimplementasikan. Adapun variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi meliputi faktor sosial, ekonomi, dan teknologi, tingkat dukungan masyarakat, pengaruh kelompok kepentingan, dukungan pimpinan, serta komitmen dan kapasitas aparat pelaksana, yang secara keseluruhan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

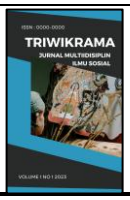
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiah melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek penelitian (Moleong, 2012). Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual makna dari proses, aktivitas, serta interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Driyorejo. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, peran aktor pelaksana, serta faktor pendukung dan penghambat di tingkat lokal.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data ini bersumber dari perkataan, tindakan, serta pengalaman informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, meliputi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, pemerintah kecamatan dan desa, petugas puskesmas, kader kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat. Data primer digunakan untuk menggali informasi terkait proses pelaksanaan kebijakan, bentuk koordinasi lintas sektor, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi di Kecamatan

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com



Driyorejo. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama dan berfungsi sebagai data pendukung. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, arsip, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, data prevalensi stunting, serta literatur ilmiah yang relevan. Sumber data ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memperkaya analisis implementasi kebijakan agar lebih komprehensif dan sistematis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, aparat kecamatan dan desa, petugas puskesmas, kader kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan program, interaksi antaraktor, serta kegiatan layanan kesehatan di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, berupa peraturan perundang-undangan, laporan program, data stunting, serta bukti visual dan catatan lapangan. Kombinasi ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Analisi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya pada tahap reduksi data, peneliti memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian dan kerangka teori Mazmanian dan Sabatier. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar hubungan antar temuan dapat dipahami secara utuh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian secara bertahap dan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan konsistensi antar sumber.

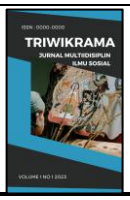
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat 3 aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu; mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, berikut untuk pemaparannya.

1. **Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan**
    a. **Kesulitan Teknis**

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kesulitan teknis dalam implementasi Perbup 9/2023 di Driyorejo terutama dipengaruhi mobilitas penduduk dan pola pengasuhan yang tidak konsisten, sehingga pendataan dan intervensi sering terputus. Keterbatasan dana PMT serta variasi perilaku makan balita turut mengurangi efektivitas program. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik masalah memiliki tingkat kendali rendah karena dipengaruhi faktor sosial-demografis wilayah industri. Hasil ini menguatkan temuan (Firmansyah Aji & Novaria, 2025) mengenai hambatan teknis berbasis partisipasi masyarakat, namun konteks Driyorejo menekankan pengaruh mobilitas penduduk sebagai faktor pembeda yang signifikan

b. Keragaraman Perilaku Kelompok Sasaran

Berdasarkan temuan penelitian, keragaman perilaku masyarakat di Kecamatan Driyorejo dipengaruhi oleh struktur sosial wilayah industri, di mana banyak ibu bekerja sehingga praktik pengasuhan dialihkan kepada nenek atau pengasuh. Kondisi ini menyebabkan pesan edukasi gizi tidak selalu terimplementasi secara konsisten di tingkat rumah tangga. Perbedaan latar belakang antara penduduk asli dan pendatang juga menghasilkan variasi dalam pola makan, perilaku kesehatan, serta partisipasi terhadap layanan posyandu. Temuan ini sejalan dengan (Shauma & Purbaningrum, 2022), meskipun di Driyorejo mobilitas penduduk dan pola kerja industri menjadi faktor pembeda yang lebih dominan. Secara keseluruhan, indikator keragaman perilaku menurut Mazmanian dan Sabatier masih berada dalam kategori dapat dikendalikan, meskipun diperlukan strategi edukasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik pengasuhan dan pola kerja masyarakat setempat.

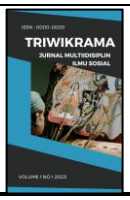
c. Prosentase Kelompok Sasaran terhadap Populasi

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sebuah data yaitu jumlah kasus stunting di Kecamatan Driyorejo tahun 2025. Kecamatan Driyorejo memiliki jumlah kelompok sasaran yang cukup besar. Jumlah balita yang datang ditimbang mencapai 7.267 balita pada Juli, 7.581 balita pada Agustus, dan 7.288 balita pada September. Dari jumlah tersebut, kasus stunting tercatat 455 balita (6,26%) di bulan Juli, 488 balita (6,44%) di bulan Agustus, dan 444 balita (6,09%) di bulan September. Cakupan sasaran yang besar ini mencerminkan karakter wilayah Driyorejo yang padat penduduk dan dipengaruhi mobilitas pekerja industri.

Meskipun jumlah sasaran luas, layanan kesehatan seperti posyandu, pendataan rutin, dan dukungan kader mampu menjangkau sebagian besar populasi secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kelompok sasaran tidak menghambat implementasi kebijakan, dan indikator persentase kelompok sasaran menurut Mazmanian dan Sabatier dapat dinilai terpenuhi. Jika dibandingkan dengan studi (Firmansyah Aji & Novaria, 2025) hasil ini menguatkan argumen bahwa keberhasilan program tidak selalu ditentukan oleh besar kecilnya populasi sasaran, melainkan oleh kualitas pendataan dan koordinasi antarpelaksana. Dengan demikian, Driyorejo menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengelola kelompok sasaran yang besar melalui mekanisme layanan yang relatif stabil.

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. **Kemampuan Kebijakan untuk Menstruktur Proses Implementasi**

a. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana di Kecamatan Driyorejo mulai dari puskesmas, pemerintah desa, hingga kader secara umum memahami arah dan prioritas yang ditetapkan dalam Perbup Gresik No. 9 Tahun 2023. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyampaian di tingkat pelaksana, koordinasi rutin mampu menjaga konsistensi pelaksanaan program. Dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah terformulasi dengan cukup jelas untuk memandu tindakan di lapangan. Temuan ini juga sejalan dengan (Fadhlurrohman, 2025) yang menekankan bahwa kejelasan tujuan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan stunting.

b. Digunakan Teori Kausal yang Memadai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup Gresik No. 9 Tahun 2023 telah disusun menggunakan teori kausal yang jelas, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier. Kebijakan ini mengatur faktor penyebab stunting seperti kurangnya asupan gizi, pola asuh yang tidak optimal, penyakit infeksi, dan kondisi keluarga, dan pendekatan tersebut tampak diterapkan melalui penyuluhan gizi, pemantauan posyandu, serta pendampingan keluarga. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya merata karena dipengaruhi perilaku orang tua, ketidakberlanjutan PMT, serta kebiasaan makan anak yang sulit dikendalikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Afdira, 2023), yang menekankan bahwa intervensi berbasis teori kausal tidak akan optimal tanpa keterlibatan perilaku dan komitmen keluarga. Dengan demikian, indikator "teori kausal yang memadai" dapat dinilai terpenuhi, meski keberhasilannya tetap bergantung pada penerimaan dan praktik masyarakat di tingkat rumah tangga.

c. Ketepatan Alokasi Sumber Daya

Penelitian menunjukkan bahwa alokasi sumber daya dalam implementasi Perbup Gresik No. 9 Tahun 2023 di Kecamatan Driyorejo tergolong memadai. Tenaga kesehatan, terutama bidan desa, telah tersedia, dan sebagian besar posyandu dilengkapi alat antropometri standar hasil pengadaan 2023. Namun, beberapa keterbatasan masih ditemukan, seperti minimnya tenaga gizi, belum berkelanjutannya pendanaan PMT, serta kurangnya media edukasi di beberapa desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sumber daya inti telah terpenuhi, efektivitas program tetap dipengaruhi ketersediaan dukungan teknis di tingkat desa. Temuan ini sejalan dengan (Cici Ariyanti et al., 2024), yang menunjukkan bahwa kecukupan SDM dan fasilitas desa menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan stunting. Dengan demikian, indikator alokasi sumber daya dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier dapat dinilai terpenuhi, meskipun beberapa aspek teknis masih memerlukan penguatan.

d. Keterpaduan Hierarki dalam dan Antar Lembaga Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga di Kecamatan Driyorejo berlangsung cukup efektif. Komunikasi rutin melalui forum lintas sektor dan pelaporan digital membantu pelaksana memahami tugas masing-masing, terlihat dari cepatnya tindak lanjut kasus serta pembagian peran yang tertata. Meskipun tidak semua

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

desa selalu hadir dalam pertemuan, mekanisme koordinasi tetap berjalan stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur keterpaduan hierarki dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier telah terpenuhi, sejalan dengan temuan (Afdira, 2023) yang menegaskan bahwa konsistensi koordinasi lintas sektor berperan penting dalam keberhasilan program penurunan stunting.



Gambar 3 Kegiatan Mini Lokakarya di Kecamatan Driyorejo.
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Driyorejo, 2024

Gambar tersbut menunjukkan pelaksanaan mini lokakarya sebagai salah satu bentuk koordinasi lintas sektor yang mendukung penyamaan persepsi dan evaluasi program di tingkat kecamatan Driyorejo.

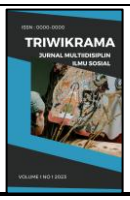
e. Aturan-aturan Keputusan dari Badan Pelaksana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksana di Kecamatan Driyorejo bekerja berdasarkan seperangkat aturan yang cukup lengkap mulai dari juknis, SOP puskesmas, SK percepatan stunting desa, hingga panduan aplikasi GUS. Kejelasan pedoman ini membuat alur kerja seperti pemantauan, pelaporan, dan tindak lanjut kasus berjalan lebih terstruktur di berbagai tingkat pelaksana. Dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier, kondisi tersebut mencerminkan bahwa aspek “aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana” dalam proses implementasi sudah berfungsi dengan baik**.** Jika dibandingkan dengan temuan (Ardilla et al., 2024) yang mencatat bahwa banyak daerah masih kesulitan menjalankan SOP karena minim fasilitas, kondisi Driyorejo tampak lebih siap secara struktural sehingga pedoman teknis dapat diterapkan dengan lebih stabil.

f. Rekrutmen Pejabat Pelaksana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen pelaksana di Kecamatan Driyorejo berlangsung sesuai alur formal melalui SK, sementara di tingkat desa pemilihan kader lebih bertumpu pada komitmen dan kesediaan mereka terlibat dalam kegiatan sosial. Setelah direkrut, para kader memperoleh arahan teknis dari puskesmas atau dinas, meskipun intensitas pembinaannya tidak selalu sama di setiap desa. Pola ini membuat para pelaksana bekerja cukup efektif karena sebagian besar memiliki motivasi sosial yang kuat, dan masyarakat juga menilai mereka menjalankan tugas dengan baik, terutama di posyandu dan pendampingan balita. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Firmansyah Aji & Novaria, 2025) yang menekankan pentingnya kapasitas pelaksana dalam keberhasilan

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com



program stunting. Dengan demikian, indikator ini telah memenuhi kerangka Mazmanian & Sabatier karena proses rekrutmen berjalan jelas dan pelaksana memperoleh pembinaan yang memadai untuk menjalankan peran di lapangan.

3. **Variabel di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi**

a. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Driyorejo. Meski kondisi ekonomi wilayah relatif baik, tantangan tetap muncul akibat perbedaan pendidikan ibu, pola asuh yang kurang optimal, serta keterbatasan ekonomi di beberapa desa. Pola asuh menjadi hambatan utama bagi keluarga dengan orang tua bekerja, sementara keluarga berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Pemanfaatan aplikasi pelaporan juga belum optimal karena keterbatasan akses digital dan rendahnya minat mencari informasi kesehatan secara daring. Hal ini diperkuat oleh (Shauma & Purbaningrum, 2022) yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat pendidikan dan minimnya literasi gizi turut menghambat keberhasilan implementasi kebijakan stunting. Secara keseluruhan, indikator ini belum sepenuhnya memenuhi kerangka Mazmanian & Sabatier sehingga diperlukan penguatan edukasi, pendampingan keluarga, dan peningkatan literasi digital.

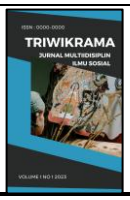
b. Dukungan Publik

Dukungan publik dalam penelitian ini terlihat dari bagaimana masyarakat menerima dan terlibat dalam berbagai kegiatan terkait penurunan stunting di Kecamatan Driyorejo. Warga umumnya merespons positif, terutama melalui kehadiran mereka di posyandu dan kegiatan penyuluhan, meskipun beberapa kelompok masih belum terlibat secara rutin. Meski demikian, penerimaan masyarakat yang cukup luas menjadi modal penting bagi kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Jika dibandingkan dengan penelitian (Firmansyah Aji & Novaria, 2025), pola partisipasi masyarakat di Driyorejo menunjukkan kecenderungan yang lebih baik. Dalam studi mereka, keterlibatan masyarakat justru menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas intervensi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya ideal, dukungan publik di Driyorejo relatif lebih mendukung jalannya kebijakan dibandingkan temuan di lokasi lain.

c. Sikap dan Sumber Daya yang Dimiliki Kelompok Pemilih

Dalam konteks penelitian ini, kelompok pemilih seperti PKK, tokoh masyarakat, dan sejumlah perusahaan melalui program CSR menunjukkan sikap yang mendukung terhadap kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Driyorejo. Dukungan mereka tampak dari keterlibatan dalam edukasi, pendampingan, pendataan, hingga penyediaan sumber daya tambahan seperti PMT. PKK menjadi pihak yang paling konsisten di seluruh desa, sementara dukungan dari CSR hanya dirasakan di beberapa wilayah. Meskipun tingkat keterlibatan berbeda antar desa, kelompok-kelompok ini tetap menunjukkan penerimaan yang baik terhadap program tanpa adanya kritik signifikan terhadap pelaksanaannya. Gambaran ini sejalan dengan temuan (Cici Ariyanti et al., 2024), yang menunjukkan bahwa peran PKK dan kolaborasi lintas sektor mampu memperkuat efektivitas kebijakan stunting

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



di Mojokerto. Kondisi serupa terlihat di Driyorejo, di mana PKK menjadi aktor kunci dalam menopang berbagai kegiatan di lapangan. Secara keseluruhan, dukungan kelompok pemilih memberikan kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan, meskipun tingkat intensitasnya masih bervariasi antar desa.

d. Dukungan dari Pejabat Atasan

Dalam kerangka implementasi kebijakan, pejabat atasan memegang peran penting karena dapat memberikan legitimasi, arahan, serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prioritas pemerintah. Dalam penelitian ini, dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan aktif pejabat kabupaten, kecamatan, hingga desa dalam koordinasi, supervisi, dan penyediaan sarana dasar yang dibutuhkan program penurunan stunting di Driyorejo. Meskipun tidak semua dukungan bersifat material, pelibatan mereka dalam monitoring dan pengambilan keputusan menunjukkan adanya komitmen yang cukup kuat. Situasi ini juga tampak selaras dengan hasil penelitian (Cici Ariyanti et al., 2024). Dalam studi tersebut, dukungan pejabat daerah terbukti mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program stunting. Pola yang sama terlihat di Driyorejo, di mana keterlibatan pejabat dari tingkat kabupaten hingga desa ikut membantu menjaga ritme pelaksanaan program, meskipun kualitas dan intensitas dukungannya masih berbeda antar wilayah.

e. Komitmen dan Keterampilan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana

Menurut Mazmanian dan Sabatier, komitmen dan kapasitas kepemimpinan pelaksana menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana program stunting di Driyorejo mulai dari petugas dinas kesehatan, pihak kecamatan, hingga kepala desa, bidan, dan kader menunjukkan komitmen yang tinggi dalam koordinasi, monitoring, dan pendampingan anak stunting. Ketua kader aktif memantau kegiatan posyandu dan melaporkan kendala ke bidan desa, sehingga pelaksanaan program tetap terjaga meski ada perbedaan kapasitas individu. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Cici Ariyanti et al., 2024) di Mojokerto, yang menunjukkan bahwa konsistensi pelaksana dan koordinasi lintas sektor sangat menentukan efektivitas program, meskipun variasi kemampuan antar pelaksana tetap menjadi tantangan.

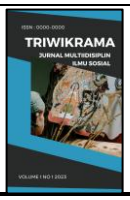
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Driyorejo

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan para informan di tingkat kabupaten, kecamatan, puskesmas, desa, kader, hingga penerima program, ditemukan sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 di Kecamatan Driyorejo.

A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Driyorejo terutama berkaitan dengan tersedianya anggaran, pedoman kebijakan, serta akses pelayanan kesehatan yang memadai. Informan dari Dinas Kesehatan dan Kecamatan menegaskan bahwa kecukupan dana menjadi faktor utama yang memungkinkan program

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com



berjalan sesuai rencana. Hal ini sesuai dengan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa kebijakan dengan sumber daya kuat cenderung lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sarana prasarana posyandu, dukungan lintas sektor, dan kegiatan edukasi rutin dari puskesmas menjadi pendukung penting, karena meningkatkan konsistensi pemantauan dan pelayanan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, terutama kepedulian ibu-ibu balita dalam mengikuti posyandu dan menerima edukasi, memperkuat efektivitas implementasi. Secara keseluruhan, faktor pendukung ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup No. 9 Tahun 2023 di Driyorejo memiliki fondasi struktural dan operasional yang cukup kuat untuk dijalankan.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi lebih banyak bersumber dari aspek sosial dan perilaku masyarakat. Hambatan utama adalah pola asuh yang kurang tepat, mitos terkait gizi, serta rendahnya kesadaran dan kedisiplinan orang tua dalam menghadiri posyandu. Kondisi ini konsisten dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menegaskan bahwa implementasi sering terhambat ketika masalah menuntut perubahan perilaku sosial. Hambatan berikutnya berasal dari keterbatasan ekonomi keluarga, yang memengaruhi kemampuan menyediakan makanan bergizi. Selain itu, ketidakhadiran rutin ke posyandu akibat pekerjaan orang tua atau balita diasuh nenek mengganggu validasi data dan pemantauan tumbuh kembang. Dari sisi pelaksana, masih terdapat kendala berupa kurangnya pelatihan kader, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya posyandu, dan pengalaman negatif dengan tenaga kesehatan di masa lalu. Secara keseluruhan, faktor penghambat ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan masih membutuhkan penguatan edukasi, peningkatan kapasitas kader, serta strategi komunikasi yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Driyorejo.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Driyorejo belum berjalan secara efektif. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah balita stunting dari tahun ke tahun, meskipun berbagai program telah dilaksanakan. Berdasarkan analisis menggunakan model Mazmanian dan Sabatier, kendala utama terletak pada indikator mudah tidaknya masalah dikendalikan, seperti tingginya mobilitas penduduk, ketidakstabilan data sasaran, pola asuh yang tidak konsisten, serta keragaman perilaku keluarga. Sementara itu, indikator kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi menunjukkan kinerja yang relatif baik, ditandai dengan adanya SOP, SK TPPS, pedoman teknis, koordinasi lintas sektor, serta dukungan sarana dan kader posyandu. Namun, variabel di luar kebijakan, khususnya kondisi sosial ekonomi dan rendahnya literasi gizi masyarakat, masih menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Sejalan dengan temuan tersebut, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Driyorejo dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama berasal dari aspek struktur kebijakan, seperti kejelasan regulasi, koordinasi lintas sektor, keterlibatan kader, serta dukungan tokoh

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

masyarakat dan organisasi sosial. Di sisi lain, faktor penghambat lebih dominan berasal dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya pemahaman gizi, kebiasaan makan anak, serta kepercayaan terhadap mitos kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah dirancang dengan baik, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana dan masyarakat dalam merespons tantangan sosial yang berada di luar kendali administratif kebijakan.

Saran

Berdasarkan indikator dengan capaian paling rendah, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan serta variabel luar kebijakan, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat aplikatif dan langsung terkait dengan kelemahan yang ditemukan selama implementasi kebijakan.

1. Ketidakstabilan data akibat tingginya mobilitas penduduk perlu diatasi melalui sistem pendataan dinamis dengan pembaruan data rutin oleh kader posyandu dan Tim Pendamping Keluarga, didukung aplikasi pencatatan terpadu agar intervensi lebih tepat sasaran.
2. Ketidakkonsistenan pola asuh pada keluarga bekerja memerlukan edukasi yang tidak hanya menyasar ibu, tetapi juga pengasuh utama, seperti nenek atau pengasuh harian, melalui kelas pengasuhan dan kunjungan rumah terjadwal.
3. Rendahnya literasi gizi perlu ditangani dengan edukasi praktis, seperti demo masak berbasis bahan pangan murah dan penyusunan panduan menu sederhana yang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga sasaran.
4. Keterbatasan ekonomi keluarga dapat direspons melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan secara terstruktur untuk penyediaan PMT berkelanjutan bagi keluarga berisiko tinggi berdasarkan rekomendasi puskesmas.
5. Kendala penggunaan sistem pelaporan digital perlu diatasi melalui pelatihan kader berbasis praktik langsung dengan pendampingan intensif guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
6. Rendahnya kepercayaan dan keberlanjutan mitos kesehatan dapat diminimalkan melalui kunjungan rumah berkala oleh kader dan Tim Pendamping Keluarga sebagai upaya membangun kepercayaan dan meningkatkan penerimaan program.

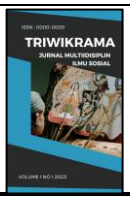
5. DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W. (2022). *10 Kecamatan Jadi Prioritas Penanganan Stunting di Gresik*. Surya.Co.Id. https://surabaya.tribunnews.com/2022/07/31/10-kecamatan-jadi-prioritas-penanganan-stunting-di-gresik

Afdira, V. (2023). Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya. In *Jurnal Administrasi Karya Dharma* (Vol. 2, Issue September). https://repository.uin-suska.ac.id/74591/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf

Ardilla, A., Zulkarnaini, Z., Utaminingsih, E., Irafadillah Effendi, D., Vita Sari, D., & Fatmawati, F. (2024). Analysis of The Implementation of Countermeasure Policies Against Stunting. *Babali*

*Corresponding author
E-mail addresses: sevira.nazerina@gmail.com



Nursing Research, *5*(2), 322–333. https://doi.org/10.37363/bnr.2024.52321

Cici Ariyanti, Dida Rahmadanik, & M. Kendry Widiyanto. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *2*(3), 50–61. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1299

Fadhlurrohman, H. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Capaian SDGs di Indonesia*. *6*(3), 857–875. https://doi.org/http://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.757

FAO. (2023). *Asia dan Pasifik Tinjauan Regional Ketahanan Pangan dan Gizi 2023*. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ece06cad-5b24-49d5-8b79-8ac8cb86328d/content

Firmansyah Aji, R., & Novaria, R. (2025). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(3), 1275–1284. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i3.7255

Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021

Infogresik. (2025). *15,2 Persen Warga Gresik Masih Terkena Stunting*. https://infogresik.id/152-persen-warga-gresik-masih-terkena-stunting-pemkab-gresik-targetkan-2030-turun-menjadi-satu-digit/

KabarBaik.co. (2025). *Awal Tahun 2025, Kasus Stunting di Gresik Melonjak*. https://kabarbaik.co/awal-tahun-2025-kasus-stunting-di-gresik-melonjak/

Kemenkes. (2025). *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*. https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198

Kurniati, N. M., Putu, N., Astuti, W., Fina, K., Putri, A., Pura, U. D., Studi, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F., & Pura, U. D. (2025). *Kejadian Stunting Berdasarkan Faktor Wilayah Desa-Kota dan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar Prevalence of Stunting Based on Urban-Rural Area Factors and Tourism Villages in Gianyar Regency*. *10*, 1–7. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/arkesmas/article/view/17176/5699

Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(2), 97–104. https://jkp-unri.ejournal.unri.ac.id/index.php/jkp-unri/index

Trisilawati, R., & Syahputri, R. B. (2023). Determinan Stunting di Indonesia : Literatur Review. *Prosiding of Conference of Health and Social Humaniora*, *1*(1), 108–121. https://prosiding.umkla.ac.id/cohesin/index.php/home/article/view/11

WHO. (2020). *World Health Statistic 2020 Monitoring Healt For The SDGs* (Vol. 2). https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf